

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Resolusi 16/18 Dewan HAM PBB yang diadopsi Pemerintah Inggris kedalam kebijakan Equality Act 2010 memiliki dampak yang signifikan terhadap pencegahan gerakan islamofobia dan anti-imigran di Inggris melalui lembaga Tell MAMA yang ditunjukkan dengan terbentuknya struktur sosial yang harmonis, meningkatkan toleransi antar umat beragama, dan perlindungan kelompok minoritas. Dalam menunjang keberhasilan upaya tersebut diperlukannya peran Pemerintah Inggris yang di dukung oleh lembaga Tell MAMA sebagai organisasi independen yang diberi mandat untuk menangani laporan laporan terkait tindakan diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan komunitas muslim di Inggris. Kebijakan *Equality Act 2010* sebagai salah satu kebijakan anti diskriminasi dan intoleransi yang berlaku di Inggris sebagai bentuk komitmen Inggris dalam melindungi setiap warga negaranya tanpa adanya ketentuan yang merugikan pihak manapun. Secara spesifik kesimpulan dalam penelitian ini di uraikan sebagai berikut:

Pertama, Komitmen Pemerintah Inggris dalam membahas implementasi Kebijakan Resolusi 16/18 dengan melakukan pertemuan internasional tingkat tinggi level menteri pada tahun 2013. Berdasarkan catatan resmi parlemen Inggris (Hansard) bahwa Baroness Warsi yang pada saat itu menjabat sebagai menteri luar negeri dan persemakmuran Inggris menjadi inisiator dalam pertemuan tingkat tinggi level menteri dalam membahas upaya pencegahan diskriminasi, intoleransi dan kebebasan beragama berdasarkan Kebijakan Resolusi 16/18 yang berlangsung di *Lancaster House* pada pusat Kota London, Inggris. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai delegasi negara serta perwakilan dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memiliki fokus utama dalam mengupayakan proses implementasi Kebijakan Resolusi 16/18 pada negara-negara yang hadir pada saat itu termasuk Inggris sebagai elemen pendukung dari kerangka hukum yang berlaku sesuai ketentuan pada setiap negara. Selain itu juga, kerangka hukum yang kuat juga diperlukan

sebagai upaya dalam memerangi tindakan diskriminasi dan intoleransi sehingga kelompok minoritas dan kelompok rentan memiliki perlindungan hukum yang sesuai.

Kedua, langkah tegas yang diambil oleh lembaga Tell MAMA sebagai organisasi independen memiliki komitmen untuk membantu upaya penanganan dan pencegahan gerakan islamophobia dan anti imigran yang dilakukan Pemerintah Inggris. Dalam mewujudkan aksi tersebut Tell MAMA memberikan proposal pernyataannya kepada Pemerintah Inggris terkait upaya kolaboratif antara instansi pemerintahan, lembaga swasta, Tell MAMA, tokoh agama dan masyarakat sipil untuk turut serta dalam membantu penanganan laporan mengenai tindakan kekerasan, kejahatan, dan intoleransi terhadap komunitas muslim dan kelompok imigran sehingga korban mendapatkan perlindungan sesuai hukum yang berlaku dan pelaku mendapatkan sanksi pidana yang setimpal. Tell MAMA juga menentang semua tindakan tokoh pejabat dan media mainstream yang berupaya melakukan doktrin dan propaganda terhadap komunitas muslim dan kelompok imigran untuk kepentingan citra politik semata.

Ketiga, kebijakan *Equality Act 2010* belum sepenuhnya menjadi norma anti diskriminasi dan intoleransi yang berlaku secara efektif di Inggris. Lonjakan kasus islamophobia dan anti imigran di Inggris hingga saat ini masih belum sepenuhnya di rampungkan secara cepat dan efisien dalam mencegah gerakan ultranasionalis dan kelompok sayap kanan terkait ideologi dan doktrin mereka yang merugikan kelompok imigran dan komunitas muslim di Inggris. Walaupun demikian, kehadiran lembaga Tell MAMA sebagai organisasi yang memiliki ambisi terhadap upaya perlindungan terhadap korban yang mengalami tindakan kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan hasil fakta yang ditemukan dalam proses penelitian, bahwa diperlukannya dukungan oleh Pemerintah Inggris serta instansi keamanan setempat terhadap peningkatan pelayanan publik yang selama ini dijalankan oleh Tell

MAMA sebagai lembaga penerima laporan sehingga korban dari tindakan diskriminasi, intoleransi, kekerasan dan kejahatan di Inggris yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan dapat di tangani dengan hukum yang berlaku dan adanya sanksi pidana terhadap pelaku-pelaku kejahatan tersebut.

Selain itu juga, Peneliti juga menyarankan bahwa perlu adanya kontribusi dari masyarakat sipil, tokoh komunitas serta tokoh agama di Inggris untuk melakukan dialog kebersamaan dalam membahas upaya pencegahan gerakan islamophobia dan anti imigran di Inggris serta menghilangkan stigma buruk terhadap pendatang dan komunitas muslim yang selama ini telah di anggap buruk dan radikal oleh kelompok ekstrimis sayap kanan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perwujudan dari melahirkan kembali lingkungan masyarakat yang aman bagi seluruh kalangan masyarakat Inggris.

6.2.2 Saran Teoritis

Berdasarkan hasil fakta yang ditemukan dalam proses penelitian, bahwa saran yang diberikan peneliti untuk pengembangan ilmu studi Hubungan Internasional adalah perlu adanya penelitian yang lebih banyak terkait konsep hak asasi manusia dengan berfokus pada dinamika gerakan islamophobia dan anti imigran di beberapa negara kawasan Eropa. Mengingat hasil temuan penelitian ini yang menunjukkan bahwa hingga saat ini gerakan islamophobia dan anti imigran masih terjadi di Inggris, kajian lebih lanjut mengenai Resolusi 16/18 sebagai rujukan utama oleh Pemerintah Inggris perlu dilakukan lebih komperhensif dan mendalam sehingga pada kemudian hari pengambilan kebijakan dalam negeri berdasarkan asas kemanusiaan dan kesetaraan.